

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RABU, 14 APRIL 2010**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Hari/Tanggal	: <u>Rabu, 14 April 2010</u>
Pukul	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Juliasih, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009; 2. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 & Usulan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010; dan 3. Masalah Aktual Lainnya terkait dengan Fungsi Anggaran.
Kehadiran	: 38 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 11 orang izin

HADIR :

- | | |
|--|------------------------------------|
| ♦ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ♦ Alexander Litaay |
| ♦ Ganjar Pranowo | ♦ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phil |
| ♦ Ir. Teguh Juwarno, M.Si | ♦ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ♦ Muslim, SH | ♦ Arif Wibowo |
| ♦ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ♦ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH |
| ♦ Drs. H. Djufri | ♦ H.M Gamari Sutrisno |
| ♦ Drs. H. Amrun Daulay, MM | ♦ H. Tossy Aryanto, SE.,MM |
| ♦ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum | ♦ Aus Hidayat Nur |
| ♦ Rusminiati, SH | ♦ H. Sukiman, S.Pd.,MM |
| ♦ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ♦ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ♦ Kasma Bouty, SE.,MM | ♦ Wa Ode Nurhayati, S.Sos |
| ♦ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ♦ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ♦ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si | ♦ H. M. Izzul Islam |
| ♦ Mustokoweni Murdi, SH | ♦ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ♦ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ♦ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ♦ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ♦ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ♦ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ♦ Mestariyany Habie, SH |
| ♦ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ♦ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ♦ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ♦ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH |

IZIN :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ♦ Ignatius Mulyono | ♦ Irvansyah, S.IP |
| ♦ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH | ♦ Agus Purnomo, S.IP |
| ♦ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ♦ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si |
| ♦ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM | ♦ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ♦ Dr. M. Idrus Marham | ♦ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |
| ♦ Dra. Eddy Mihati, M.Si | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

EVALUASI PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2009

Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009 untuk 10 (sepuluh) Program sebesar **Rp9.635.953.912.000,-**, sedangkan realisasi penyerapan anggaran tersebut sebesar **Rp8.315.960.438.000,- (86,30%)**.

PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2010

Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp12.524.799.694.000,-**, untuk dilaksanakan oleh 745 Satuan Kerja yang terdiri dari atas 12 Satuan Kerja pada Kantor Pusat, 11 Satuan Kerja pada Kantor Daerah, 235 Satuan Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi, 93 Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan, dan Satuan Kerja Pelaksana Dana Urusan Bersama 394 Satuan Kerja. Terdapat kenaikan Anggaran sebesar **(43,93%)** dari Tahun Anggaran 2009.

USULAN PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2010

Usulan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 untuk Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp868.572.533.000,-**.

Dari usulan tersebut sebesar **Rp726.000.000.000,-** untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, yaitu :

- Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP);
- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah baik di pusat maupun antar pusat dan daerah;
- Pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyusunan Kajian Peraturan Pelaksananya;
- Finalisasi Strategi Dasar Penataan Daerah;
- Penyusunan Peraturan Perundangan untuk memperkuat Reintegrasi Aceh;
- Pengkajian 3000 Perda dan pemantauan tindak lanjut dari Perda yang dibatalkan;
- Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan di Bidang Hukum;
- Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
- Cakupan Penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM; dan
- Pemberian NIK kepada setiap penduduk.

Sedangkan tambahan alokasi sebesar **Rp142.572.533.000,-** untuk tambahan pagu tersebut akan dialokasikan untuk membiayai Program/kegiatan :

- Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air;
- Penyempurnaan Kebijakan politik dalam negeri melalui penyempurnaan Undang-Undang bidang politik;
- Deteksi dini situasi/politik di daerah dan penyiapan peta politik dalam negeri;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di 7 Provinsi, 202 Kabupaten, dan 35 Kota Tahun 2010;
- Tambahan Alokasi Anggaran untuk pemberian NIK kepada setiap penduduk;
- Orientasi kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Dukungan Penyiapan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- Pembayaran Gaji Praja IPDN hasil Penerimaan Tahun 2008/2009 sebanyak 1000 orang selama 5 (lima) bulan dan pembayaran tunjangan profesi Dosen dan tunjangan profesi profesor; dan
- Perbaikan sarana dan prasarana Asrama Kampus IPDN Jatinangor.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terhadap usulan APBN Perubahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp868.572.533.000,-** (*delapan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas usulan dalam RUU APBN-P Tahun 2010 sebesar **Rp726.000.000.000,-** (*tujuh ratus dua puluh enam miliar rupiah*) dan usulan tambahan alokasi sebesar **Rp142.572.533.000,-** (*seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). Komisi II DPR RI **dapat menyetujui**, usulan tersebut. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasan secara lebih rinci terhadap kegiatan-kegiatan dari anggaran yang diusulkan.
2. Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasan secara detail dan komprehensif terhadap seluruh permasalahan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI.

Catatan:

Untuk alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor-kantor Pemerintah di Daerah diusulkan pada RAPBN Tahun Anggaran 2011

Rapat ditutup Pukul 15.40 WIB.

**JAKARTA, 14 APRIL 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

**GANJAR PRANOWO
A-365**